

# LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

Sekretariat BPTJ

LAPORAN  
TRIWULAN  
IV

2021

Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek  
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan “**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan IV Tahun 2021**” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam rangka terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagai salah satu unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan telah menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel guna mendukung akuntabilitas Kementerian Perhubungan di bidang pengelolaan transportasi perkotaan, khususnya untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan IV Tahun 2021 berisikan program dan kegiatan bidang pengelolaan transportasi perkotaan yang dilaksanakan selama triwulan IV tahun 2021 sebagai bentuk implementasi konsep Rencana Strategis Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai oleh Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selama kurun waktu triwulan IV tahun 2021.

Jakarta, Januari 2022

SEKRETARIS  
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI  
JABODETABEK



Ir. Zamrides, M. Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19661223 199403 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
DAFTAR TABEL .....	5
BAB I PENDAHULUAN .....	6
1.1. LATAR BELAKANG .....	6
1.2. PERJANJIAN KINERJA .....	8
1.3. REVIU INDIKATOR .....	9
BAB II DATA DAN ANALISIS CAPAIANKINERJA .....	11
2.1. CAPAIAN KINERJA.....	11
2.1.1. IKK12 Nilai SAKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.....	12
2.1.2. IKK13 Nilai Maturitas SPIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabe.....	14
2.1.3. IKK14 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.....	18
2.1.4. IKK15 Indeks Profesionalitas ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.....	19
2.1.5. IKK16 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.....	22
2.1.6. IKK17 Indeks Pengelolaan Aset Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.....	24
2.1.7. IKK18 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.....	26
2.1.8. IKK19 Nilai Reputasi Positif Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.....	29
2.1.9. IKK20 Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan.....	34
2.2. REALISASI ANGGARAN.....	35
BAB III PENUTUP.....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek .....	7
Gambar 2. 1 Penilaian Evaluasi atas Implementasi SAKIP BPTJ.....	13
Gambar 2. 2 Kurva S Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Sekretariat BPTJ sampai dengan Triwulan IV .....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPTJ Tahun 2021 .....	8
Tabel 1. 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Sekretariat BPTJ Tahun 2021 .....	10
Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Sekretariat BPTJ Triwulan IV Tahun 2021 .....	11
Tabel 2. 2 Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP .....	15
Tabel 2. 3 Perhitungan Indeks Tata Kelola ASN berdasarkan Realisasi Anggaran .....	18
Tabel 2. 4 Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN BPTJ Aspek Kualifikasi .....	20
Tabel 2. 5 Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN BPTJ Aspek Kompetensi .....	21
Tabel 2. 6 Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN BPTJ Aspek Kinerja .....	21
Tabel 2. 7 Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN BPTJ Aspek Disiplin .....	21
Tabel 2. 8 Perhitungan NKA atas Aspek Impelementasi .....	23
Tabel 2. 9 Perhitungan Nilai IKPA (NPA) .....	23
Tabel 2. 10 Capaian PSP di Lingkungan Kementerian Perhubungan .....	25
Tabel 2. 11 Data Perhitungan Capaian Layanan Perkantoran BPTJ .....	27
Tabel 2. 12 Permasalahan dan Tindak Lanjut Terkait Layanan Perkantoran BPTJ .....	28
Tabel 2.13 Penggabungan Nilai Positif Pemberitaan dan Pengelolaan Media Sosial Tahun 2021 .....	31
Tabel 2. 14 Penggabungan Nilai Positif Publikasi dan Pelayanan Informasi Tahun 2021 .....	31
Tabel 2. 15 Permasalahan dan Tindak Lanjut Bagian Humas .....	33
Tabel 2.16 Perhitungan Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang Telah Disahkan Menjadi Peraturan .....	34
Tabel 2. 17 Permasalahan dan Tindak Lanjut Terkait Bagian Hukum .....	34
Tabel 2.18 Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK Triwulan I s.d Triwulan III Tahun 2021 .....	36
Tabel 2. 19 Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK Triwulan IV Tahun 2021 .....	37

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek merupakan unit kerja penunjang Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- (1). Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara, serta evaluasi dan pelaporan;
- (2). Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan, penyusunan perjanjian dan kerjasama antar lembaga, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;
- (3). Penyiapan pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, administrasi perkantoran, kearsipan serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum; dan
- (4). Penyiapan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, komunikasi dan informasi publik, edukasi, publikasi dan dokumentasi, serta pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pembentukan Sekretariat BPTJ merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang telah ditetapkan pada tanggal 27 November 2018. PM Nomor 110 Tahun 2018 ini kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BPTJ juga memperhatikan penetapan Peta Jabatan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2020 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dimana Sekretariat terdiri atas Bagian Perencanaan dan keuangan, Bagian Kepegawaian dan Umum, Bagian Hukum, Bagian Hubungan Masyarakat, dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat BPTJ Triwulan IV Tahun 2021 merupakan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020, Sekretariat BPTJ melakukan penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang memberikan arah kebijakan serta pedoman dalam memetakan prioritas-prioritas pembangunan untuk mencapai indikator kinerja utama BPTJ, yaitu mewujudkan transportasi terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Renstra Sekretariat BPTJ dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta pengukuran kinerja, kinerja anggaran, dan kinerja organisasi Sekretariat BPTJ.

Sekretariat BPTJ pada Triwulan IV tahun 2021 memiliki sembilan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan *core business* dan menjadi dasar analisis capaian kinerja Sekretariat BPTJ Triwulan IV Tahun 2021. Hal ini merupakan tindak lanjut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Area Akuntabilitas oleh Kemenpan RB yang mengamanatkan bahwa indikator kinerja harus berorientasi *outcome* dan merupakan *core business* dari BPTJ

Selanjutnya, Laporan Monitoring Kinerja Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan IV Tahun 2021 berisikan program dan kegiatan bidang

dukungan manajemen yang dilaksanakan selama triwulan IV tahun 2021 sebagai bentuk implementasi Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai oleh Sekretariat BPTJ selama kurun waktu triwulan IV tahun 2021.

## 1.2. PERJANJIAN KINERJA

Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani dari Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Jabatan Fungsional Tertentu (Subkoordinator Kelompok).

Sasaran Kegiatan Sekretariat BPTJ merupakan kondisi yang diinginkan untuk dapat dicapai dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPTJ, serta capaian dan permasalahan yang dihadapi oleh BPTJ pada periode sebelumnya. Berikut Target Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPTJ Tahun 2021.

Tabel 1. 1 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPTJ Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator KinerjaKegiatan	Satuan	Target
SK9 Meningkatnya Birokrasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKK18 Nilai SAKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	86
	IKK19 Indeks Maturitas SPIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	3,15
	IKK20 Indeks Reformasi Hukum Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	73
SK10 Meningkatnya Kapailitas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKK21 Indeks Pengawasan Kearsipan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	68
	IKK22 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	75
	IKK23 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	87

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
SK11 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKK24 Indeks Pelayanan Publik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	3,5
SK12 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKK25 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	%	100

### 1.3. REVIU INDIKATOR

Telah dilaksanakan rapat evaluasi terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan pada tahun 2021, didapati bahwa Sekretariat BPTJ perlu melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Kegiatan. Atas hal tersebut, telah dilaksanakan rapat internal BPTJ yang dihadiri oleh perwakilan Pejabat Eselon II, III, Jabatan Fungsional Tertentu (Subkoordinator Kelompok) dan pegawai dari Direktorat Angkutan, Direktorat Prasarana, Direktorat Lalu Lintas, dan Sekretariat BPTJ. Setelah rapat internal tersebut, BPTJ dan unit Eselon II di BPTJ menyepakati untuk melakukan revisi serta penyesuaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP), Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPTJ, serta Renstra dan dokumen turunan lainnya.

Hasil diskusi dan masukan dari rapat internal BPTJ digunakan sebagai dasar penyusunan draft revisi Renstra BPTJ Tahun 2020-2024 beserta Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Telah dilaksanakan juga rapat Finalisasi IKU BPTJ dengan memperhatikan rekomendasi dari Kemenpan RB dan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dimana IKU BPTJ dan IKK Sekretariat BPTJ tahun 2021 harus bersifat *outcome* dari perspektif *customer* yang merepresentasikan kinerja BPTJ. Reviu Finalisasi IKU BPTJ menghasilkan perubahan baik itu di level Sasaran Program (SP), Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Program (IKP), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), penyesuaian rumusan perhitungan IKP dan IKK beserta targetnya. Terkait hal ini, diperlukan penetapan atas perubahan IKU BPTJ sebagaimana telah ditetapkan dalam SK-BPTJ 42 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2021. Berikut hasil perbaikan dan finalisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPTJ sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Kementerian PAN-RB dan Inspektorat Jenderal Kemenhub.

Tabel 1. 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Sekretariat BPTJ Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1.	<b>SK6</b> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPTJ	<b>IKK12</b> Nilai SAKIP BPTJ	Nilai	70
2.	<b>SK7</b> Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN di BPTJ	<b>IKK13</b> Nilai Maturitas SPIP BPTJ	Nilai	3,15
3.	<b>SK8</b> Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPTJ	<b>IKK14</b> Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ	Indeks	72
		<b>IKK15</b> Indeks Profesionalitas ASN BPTJ	Indeks	74
4.	<b>SK9</b> Terwujudnya Tata Laksana yang Efektif, Efisien, dan Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance di BPTJ	<b>IKK16</b> Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ	Indeks	87
		<b>IKK17</b> Indeks Pengelolaan Aset BPTJ	Indeks	60
		<b>IKK18</b> Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ	%	65
5.	<b>SK10</b> Meningkatnya Kualitas dan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik di BPTJ	<b>IKK19</b> Nilai Reputasi Positif BPTJ	Nilai	81
6.	<b>SK11</b> Terwujudnya Regulasi yang Lebih Tertib, Tidak Tumpang Tindih dan Kondusif di BPTJ	<b>IKK20</b> Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan	%	74

## BAB II DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### 2.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mengetahui realisasi capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPTJ. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran kegiatan yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat BPTJ Tahun 2021 dapat tercapai.

Berdasarkan penetapan target pada setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat BPTJ, berikut adalah pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BPTJ pada triwulan IV tahun 2021:

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Sekretariat BPTJ Triwulan IV Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK 2021	Target TW IV	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	<b>IKK12</b> Nilai SAKIP BPTJ	Nilai	70	70	70,1	100,14%
2.	<b>IKK13</b> Nilai Maturitas SPIP BPTJ	Nilai	3,15	3,15	3,755	119,21%
3.	<b>IKK14</b> Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ	Indeks	72	72	99,92	138,78%
	<b>IKK15</b> Indeks Profesionalitas ASN BPTJ	Indeks	74	74	53,55	72,36%
4.	<b>IKK16</b> Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ	Indeks	87	87	90,53	104,06%
	<b>IKK17</b> Indeks Pengelolaan Aset BPTJ	Indeks	60	60	83,03	138,38%
	<b>IKK18</b> Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ	%	65	65	73,61	113,25%
5.	<b>IKK19</b> Nilai Reputasi Positif BPTJ	Nilai	81	81	82,86	102,3%

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK 2021	Target TW IV	Realisasi	Capaian Kinerja
6.	IKK20 Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan	%	74	74	93,94	126,95%

### 2.1.1. IKK12 Nilai SAKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPTJ diperoleh dari hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada 9 (sembilan) unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Evaluasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Telah dilakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dengan sampling dari Unit Eselon II yaitu Direktorat Prasarana dan Direktorat Angkutan. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen yaitu Manajemen Kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Dari hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BPTJ memperoleh nilai 70,10 dengan predikat BB (Sangat Baik). Hasil Penilaian Implementasi SAKIP terhadap 5 komponen sebagai berikut:

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	Bobot	NILAI
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>	<b>30,00</b>	<b>24,20</b>
<b>I.</b>	<b>PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>8,28</b>
<b>a.</b>	<b>PEMENUHAN RENSTRA (2%)</b>	<b>2,00</b>	<b>1,89</b>
<b>b.</b>	<b>KUALITAS RENSTRA (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>4,14</b>
<b>c.</b>	<b>IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>2,25</b>
<b>II.</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>	<b>20,00</b>	<b>15,92</b>
<b>a.</b>	<b>PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>	<b>4,00</b>	<b>3,10</b>
<b>b.</b>	<b>KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>7,99</b>
<b>c.</b>	<b>IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b>	<b>6,00</b>	<b>4,84</b>
<b>B.</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>	<b>25,00</b>	<b>15,58</b>
<b>I.</b>	<b>PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>3,85</b>
<b>II.</b>	<b>KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)</b>	<b>12,50</b>	<b>9,04</b>
<b>III.</b>	<b>IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>2,69</b>
<b>C.</b>	<b>PELAPORAN KINERJA (15%)</b>	<b>15,00</b>	<b>10,94</b>
<b>I.</b>	<b>PEMENUHAN PELAPORAN (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>2,14</b>
<b>II.</b>	<b>PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>5,36</b>
<b>III.</b>	<b>PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)</b>	<b>4,50</b>	<b>3,45</b>
<b>D.</b>	<b>EVALUASI INTERNAL (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>8,26</b>
<b>I.</b>	<b>PEMENUHAN EVALUASI (2%)</b>	<b>2,00</b>	<b>1,92</b>
<b>II.</b>	<b>KUALITAS EVALUASI (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>4,09</b>
<b>III.</b>	<b>PEMANFAATAN EVALUASI (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>2,25</b>
<b>E.</b>	<b>PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b>	<b>20,00</b>	<b>11,13</b>
<b>I.</b>	<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>3,75</b>
<b>II.</b>	<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)</b>	<b>12,50</b>	<b>6,13</b>
<b>III.</b>	<b>KINERJA LAINNYA (2,5%)</b>	<b>2,50</b>	<b>1,25</b>
	<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>	<b>100,00</b>	<b>70,10</b>

Gambar 2. 1 Penilaian Evaluasi atas Implementasi SAKIP BPTJ

Tindak lanjut yang dilakukan oleh BPTJ sebagai upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, diantaranya:

1. Bagian Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan rapat pembahasan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan di BPTJ, kemudian ditetapkannya Reviu IKU dalam SK-BPTJ 42 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama BPTJ Tahun 2021
2. Bagian Perencanaan dan Keuangan telah menyusun dan melakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja (PK) beserta Rencana Aksi Tahun 2021
3. Sekretaris BPTJ telah menyampaikan kepada para Direktur dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat BPTJ untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Dokumen monitoring dan evaluasi tersebut sekurang-kurangnya memuat implementasi pelaksanaan kegiatan, capaian output kegiatan, permasalahan pelaksanaan beserta rencana tindak lanjut, serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi melalui rapat staf serta aplikasi e-Performance dan SMART.

### **2.1.2. IKK13 Nilai Maturitas SPIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek**

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SPIP Tahun 2021 mengacu pada peraturan yang baru yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah, dimana penilaian dilaksanakan secara Mandiri (Penilaian Mandiri) oleh masing-masing unit kerja dan dilanjutkan dengan Penjaminan Kualitas (PK) oleh Inspektorat Jenderal sebelum dievaluasi oleh BPKP.

Untuk tahun 2021, telah dilakukan Penilaian Mandiri tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP oleh Tim SPIP BPTJ, Didapatkan hasil Penilaian Mandiri BPTJ sebesar 3,890. Hasil ini kemudian disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk dilakukan Penjaminan Kualitas (PK), yaitu memberikan suatu penjaminan kualitas (quality assurance) terhadap penilaian yang telah dilakukan secara mandiri, sebelum diberikan kepada evaluator, yang dalam hal ini adalah BPKP. Pada tanggal 17 November 2021 Penjaminan Kualitas telah dilaksanakan dan didapatkan nilai Maturitas SPIP BPTJ sebesar 3,755.

Dalam hal ini capaian Nilai Maturitas SPIP BPTJ mencapai 119,21% disebabkan adanya perubahan terhadap prosedur penilaian, yang semula mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-689/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan pada tahun 2021 mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang difokuskan dalam Perka BPKP No.5 Tahun 2021 adalah penilaian Maturitas SPIP dilakukan secara mandiri oleh masing-masing unit kerja dan difokuskan untuk menemukan titik lemah atau kekurangan (Area of Improvement) setiap unit kerja. BPTJ melalui Sekretariat BPTJ tetap melakukan monitoring dan pemantauan khususnya terhadap Area of Improvement, serta melakukan koordinasi dengan masing-masing unit kerja di lingkungan BPTJ sebagai tindak lanjut maupun upaya untuk peningkatan penilaian maturitas SPIP BPTJ.

Berikut hasil penilaian dari penjaminan kualitas Maturitas SPIP BPTJ:

Tabel 2. 2 Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>		100,00%		<b>5,00</b>		
<b>BOBOT PERENCANAAN</b>			<b>40,00%</b>		<b>2,000</b>	
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>						
<b>Lingkungan Pengendalian</b>						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,906	3,75%		0,11		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	2,750	3,75%		0,10		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	1,839	3,75%		0,07		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	2,500	3,75%		0,09		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,250	3,75%		0,08		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,167	3,75%		0,08		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,11		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,000	3,75%		0,08		
<b>Penilaian Risiko</b>						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,667	10%		0,17		
Analisis Risiko (2.2)	2,450	10%		0,25		

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
<b>Kegiatan Pengendalian</b>						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2,750	2,27%		0,06		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	1,750	2,27%		0,04		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2,250	2,27%		0,05		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,250	2,27%		0,05		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2,750	2,27%		0,06		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,000	2,27%		0,05		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,500	2,27%		0,06		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,750	2,27%		0,06		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,750	2,27%		0,06		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,500	2,27%		0,06		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
<b>Informasi dan Komunikasi</b>						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,075	5%		0,10		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	2,000	5%		0,10		
<b>Pemantauan</b>						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,833	7,50%		0,14		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,625	7,50%		0,12		
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>				2,199		

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
<b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>			<b>30,00%</b>		<b>0,660</b>	
<b>PENCAPAIAN TUJUAN SPIP</b>						
<b>Efektivitas dan Efisiensi</b>						
<i>Capaian Outcome</i>	5	15%		0,75		
<i>Capaian Output</i>	5	15%		0,75		
<b>Keandalan Laporan Keuangan</b>						
Opini LK	3	25%		0,75		
<b>Pengamanan atas Aset</b>						
Keamanan Administrasi	5	10%		0,50		
Keamanan Fisik	4	5%		0,20		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
<b>Ketaatan pada Peraturan</b>						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
<b>SUB JUMLAH HASIL</b>		100,00%		3,65		
<b>BOBOT HASIL</b>			<b>30,00%</b>		<b>1,095</b>	
<b>NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>						<b>3,755</b>

### 2.1.3. IKK14 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Perhitungan IKK14 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ didasari pada IKU Manual Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Dengan mengacu pada IKU Manual Sekretariat Jenderal maka akan ditemukan perbedaan metode perhitungan. Saat IKU Manual Sekretariat Jenderal diterima, Subbagian Kepegawaian dan Organisasi segera berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi. Biro Kepegawaian dan Organisasi menjelaskan bahwa seharusnya indeks Tata Kelola Manajemen ASN sudah tidak lagi ada di dalam IKU karena aturan dasar perhitungannya tidak ada. Adapun yang seharusnya dijadikan IKU terkait pengelolaan kepegawaian adalah Sistem Merit namun aplikasinya baru dapat diakses pada Februari 2022. Atas hal tersebut maka diperkenankan menggunakan metode lama (tahun 2020) dalam perhitungan Indeks.

Atas hasil diskusi tersebut Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi memutuskan untuk menggunakan realisasi Rincian Anggaran dan Kegiatan sebagai target yang akan dicapai. Adapun perhitungan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perhitungan Indeks Tata Kelola ASN berdasarkan Realisasi Anggaran

Kegiatan	Pagu	Realisasi
A. Pengelolaan Manajemen SDM	575.198.000	575.193.402
B. Pengadaan Pegawai di Lingkungan BPTJ	294.742.000	294.077.500

Sehingga capaian dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \text{realisasi} / \text{pagu} \\ &= 575.193.402 + 294.077.500 / (575.198.000 + 294.742.000) \\ &= 869.270.902 / 869.940.000 \\ &= \mathbf{99,92} \end{aligned}$$

Capain Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ sebesar 99,92 dari target 72 dengan persentase sebesar 138,78%. Capaian melebihi target karena dihitung berdasarkan output kegiatan (belum memperhitungkan indeks layanan pengelola kepegawaian) yaitu realisasi anggaran kegiatan pengadaan ASN, Pengelolaan Kepegawaian, dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Terkait dengan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ, terdapat beberapa permasalahan khususnya pada kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi. Permasalahan terjadi pada pemutakhiran data pegawai, dimana Bank Data

pemutakhiran pegawai belum diinventarisir. Kemudian terkait kegiatan Pengadaan Pegawai di Lingkungan BPTJ. Permasalahan yang terjadi yaitu beberapa lokasi tes tidak terdapat monitor karena kekurangan anggaran.

Tindak lanjut dari permasalahan ini yaitu Bagian Kepegawaian akan melakukan koordinasi dengan tim teknis, terkait Bank Data Pemutakhiran data pegawai, serta mengusulkan/mengalokasikan penambahan anggaran khususnya pada kegiatan Pengadaan Pegawai di lingkungan BPTJ.

#### **2.1.4. IKK15 Indeks Profesionalitas ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek**

Terkait IKK15 Indeks Profesionalitas ASN BPTJ, Perhitungan dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Adapun target dan pelaksanaan Indeks Profesionalitas ASN BPTJ sebagai berikut:

1. Target Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebesar 74 dari nilai maksimal 100 diperoleh dari data seluruh Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
2. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pegawai ASN pada masing-masing instansi.
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi mengukur dengan menyebarkan kuesioner ke seluruh ASN BPTJ. Data seharusnya bias didapatkan dari SIK Kementerian Perhubungan, dan atau MySAPK, namun dengan menyebar kuesioner data yang didapatkan lebih mutakhir yang nantinya akan diinput juga ke dalam aplikasi kepegawaian.

Kemudian Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin dengan rincian sebagai berikut:

1. KUALIFIKASI  
Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran (S-3 = 25; S-2=20; S-1=15; D-III=10; D-2=5; SLTA=1)
2. KOMPETENSI  
Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 40% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran
  - a. Diklat Kepemimpinan (utk pejabat structural yang sudah diklat=15; untuk pejabat structural yang belum ikut=0)
  - b. Diklat fungsional (untuk JFT yang sudah ikut=15; untuk JFT yang belum ikut=0)

- c. Diklat Teknis (untuk structural dan JFT yang sudah ikut=15; untuk pelaksana yang sudah ikut=22,5; untuk yang belum ikut=0)
- d. Seminar (untuk structural dan JFT yang sudah ikut=10; untuk pelaksana yang sudah ikut=17,5; untuk yang belum ikut=0)

3. KINERJA

Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

- a. Nilai Kinerja 91-100 = 30;
- b. Nilai Kinerja 76-90 = 25;
- c. Nilai Kinerja 61-75 = 15;
- d. Nilai Kinerja 51-60 = 5;
- e. Nilai Kinerja 50 ke bawah = 1.

4. DISIPLIN

Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran

- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin = 5
- b. memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan = 3
- c. memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang = 2
- d. memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat = 1

Berikut adalah hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN BPTJ melalui kuesioner disebar pada tanggal 16 Desember 2021 dan diisi oleh 156 ASN di BPTJ

1. KUALIFIKASI

Aspek Kualifikasi dinilai dengan olahan data sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN BPTJ Aspek Kualifikasi

No.	Kualifikasi	%	Bobot Nilai	Total
1	S3	7,70%	25	1,925
2	S2	37,80%	20	7,56
3	S1	41%	15	6,15
4	D-III / D-IV	5,10%	10	0,51
5	D-II	7,10%	5	0,355
6	SLTA	0,60%	1	0,006
		Maksimal	25	16,506

Bobot nilai maksimal pada kriteria kualifikasi adalah 25. Setelah mendapatkan hasil dari kuesioner maka bobot nilai yang didapat oleh seluruh ASN BPTJ adalah sebesar 16,506 yaitu 66,02% dari nilai maksimal. Bila dihitung dengan dimensi kualifikasi yaitu 25% dari total perhitungan maka  $25\% \times 66,02\% = 19,81\%$

## 2. KOMPETENSI

Aspek Kompetensi dinilai dengan olahan data sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN BPTJ Aspek Kompetensi

No.	Kualifikasi	%	Bobot Nilai	Total
1	Diklat Pimpinan	100,00%	15	15
2	Diklat Fungsional	86,11%	15	12,91667
3	Diklat Teknis	25,60%	22,5	5,76
4	Seminar	53,80%	10	5,38
			Maksimal 62,5	39,05667

Bobot nilai maksimal pada kriteria kompetensi adalah 62,5. Setelah mendapatkan hasil dari kuesioner maka bobot nilai yang didapat oleh seluruh ASN BPTJ adalah sebesar 39,1 yaitu 62,49% dari nilai maksimal. Bila dihitung dengan dimensi kualifikasi yaitu 40% dari total perhitungan maka  $40\% \times 62,49\% = 25\%$

## 3. KINERJA

Aspek Kinerja dinilai dengan olahan data sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN BPTJ Aspek Kinerja

No.	Nilai SKP	%	Bobot Nilai	Total
1	91-100	66%	30	19,8
2	76-90	34%	25	8,5
3	61-75	-		
4	51-60	-		
5	50 kebawah	-		
			Maksimal 30	28,3

Bobot nilai maksimal pada kriteria kompetensi adalah 30. Setelah mendapatkan hasil dari kuesioner maka bobot nilai yang didapat oleh seluruh ASN BPTJ adalah sebesar 28,3 yaitu 94,33% dari nilai maksimal. Bila dihitung dengan dimensi kualifikasi yaitu 25% dari total perhitungan maka  $25\% \times 94,33\% = 23,58\%$

## 4. DISIPLIN

Aspek Disiplin dinilai dengan olahan data sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN BPTJ Aspek Disiplin

No.	Nilai SKP	%	Bobot Nilai	Total
1	tidak ada riwayat hukuman disiplin	98,70%	5	4,935
2	ada riwayat hukuman disiplin ringan	1,30%	3	0,039
3	ada riwayat hukuman disiplin sedang	-	2	-

4	ada riwayat hukuman disiplin berat	-	1	-
		Maksimal 5		4,974

Bobot nilai maksimal pada kriteria kompetensi adalah 5. Setelah mendapatkan hasil dari kuesioner maka bobot nilai yang didapat oleh seluruh ASN BPTJ adalah sebesar 4,974 yaitu 99,48% dari nilai maksimal. Bila dihitung dengan dimensi kualifikasi yaitu 5% dari total perhitungan maka  $5\% \times 99,48\% = 4,97\%$

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN BPTJ (IKK15) pada Subbagian Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat BPTJ = Dimensi Kriteria Kualifikasi + Dimensi Kriteria Kompetensi + Dimensi Kriteria Kinerja + Dimensi Kriteria Disiplin =  $19,81\% + 25\% + 23,58\% + 4,97\% = 53,55\%$ .

Nilai Indeks Profesionalitas ASN BPTJ (IKK15) sebesar 53,55 dengan capaian sebesar 72,36% dari target. Dengan hasil tersebut maka Indeks Profesionalitas ASN yang dihitung berdasarkan Peraturan Kepala BKN no 8 tahun 2019 tidak mencapai target (74). Adapun target tidak dapat tercapai karena anggaran dialihkan untuk kegiatan prioritas sehubungan dengan pandemi COVID 19 sehingga diharapkan pada tahun 2022 diklat teknis sebagai bentuk pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dan diikuti oleh para pejabat pelaksana di lingkungan BPTJ.

Kemudian terdapat permasalahan yang dihadapi pada Triwulan IV yaitu pada kegiatan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis di lingkungan BPTJ, dimana sebagian Rencana Diklat teknis yang memang dibutuhkan untuk hadir fisik tidak bisa dilaksanakan karena terkendala Pandemi (Kebijakan PPKM). Selain itu terkait kegiatan Sosialisasi PP 94 2021 belum dilakukan. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melaksanakan kegiatan Diklat dan Sosialisasi pada tahun berikutnya.

#### 2.1.5. IKK16 Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ dihitung dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, sehingga didapatkan:

$$\text{Indeks Pengelolaan Keuangan} = (60\% \times NKA) + (40\% \times NPA)$$

dimana:

NKA : Nilai Kinerja Anggaran

NPA : Nilai Pelaksanaan Anggaran

NKA tingkat Eselon I/program dihitung berdasarkan rata-rata dari NKA atas aspek implementasi dan NKA atas aspek manfaat, yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara NKA atas aspek implementasi dan NKA atas aspek manfaat dengan bobot masing-masing aspek evaluasi kinerja anggaran.

Aspek implemementasi memiliki bobot sebesar 33,3%. NKA atas aspek implementasi diperoleh dengan mengukur variabel-variabel:

Tabel 2. 8 Perhitungan NKA atas Aspek Impelementasi

No.	Variabel	Bobot	Nilai	Jumlah
1	Capaian Keluaran Program	43,50%	100	43,50
2	Efisiensi	28,60%	0,9	0,26
3	Konsistensi Penyerapan Anggaran	18,20%	93,25	16,97
4	Penyerapan Anggaran	9,70%	99,1	9,61
<b>NKA atas Aspek Implementasi</b>				<b>70,34</b>

Aspek manfaat memiliki bobot sebesar 66,7%. NKA atas aspek manfaat diperoleh dengan mengukur Capaian Sasaran Program, yaitu sebesar 99,01.

Dari kedua nilai tersebut, diperoleh:

$$NKA = (33,3\% \times 70,34) + (66,7\% \times 99,01) = 89,46$$

Sementara itu, NPA diperoleh dari perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanjaan Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Terdapat 13 (tiga belas) variabel dengan masing-masing bobot yang digunakan untuk mendapatkan nilai IKPA, sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Perhitungan Nilai IKPA (NPA)

No.	Variabel	Bobot	Nilai	Jumlah
1	Penyerapan Anggaran	15%	71,21	10,68
2	Data Kontrak	10%	100	10,00
3	Penyelesaian Tagihan	10%	98,94	9,89
4	Capaian Output	17%	100	17,00
5	Pengelolaan UP dan TUP	8%	100	8,00
6	Revisi DIPA	5%	83,33	4,17
7	Deviasi Halaman III DIPA	5%	69,86	3,49

No.	Variabel	Bobot	Nilai	Jumlah
8	LPJ Bendahara	5%	100	5,00
9	Renkas	5%	100	5,00
10	Kesalahan SPM	5%	80	4,00
11	Retur SP2D	5%	99,08	4,95
12	Pagu Minus	5%	100	5,00
13	Dispensasi	5%	100	5,00
<b>Nilai IKPA (NPA)</b>				<b>92,19</b>

Dari perolehan NKA dan NPA di atas, didapatkan:

$$\text{Indeks Pengelolaan Keuangan} = (60\% \times 89,46) + (40\% \times 92,19) = 90,53$$

Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut diantaranya:

- Adanya dukungan dari semua pihak khususnya dari para pimpinan di lingkungan BPTJ dalam hal pelaksanaan anggaran
- Telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap indikator-indikator pelaksanaan anggaran
- Pemahaman pegawai khususnya yang berkaitan dengan aktifitas pelaksanaan anggaran terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian
- Kesigapan dalam merespon permasalahan pelaksanaan anggaran

#### 2.1.6. IKK17 Indeks Pengelolaan Aset Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Terkait Indeks Pengelolaan Aset BPTJ, Indeks ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Perubahan ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 230 Tahun 2020 tentang Prosedur Kerja Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Rumus perhitungan Indeks Pengelolaan Aset BPTJ adalah = (50% x Tingkat Pencapaian BMN yang Dilakukan PSP) + (50% x Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN).

Tingkat Pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dihitung berdasarkan total yang telah di PSP kan, dibagi dengan total yang harus di PSP kan. Sedangkan Tingkat Kepatuhan Pelaporan BMN adalah persentase terselesaikannya laporan BMN. Setiap bulan dilakukan rekonsiliasi di dengan output laporan semesteran dan tahunan.

Tabel 2. 10 Capaian PSP di Lingkungan Kementerian Perhubungan

No.	ESELON 1	BMN YANG WAJIB DILAKUKAN PSP		SUDAH PSP				BELUM PSP			
		NUP	Nilai Perloehan	NUP	%	Nilai Perolehan	%	NUP	%	Nilai Perolehan	%
1	Sekretariat Jendral	91.681	3.457.735.410.057	80.801	88,13	2.439.035.217.570	70,54	10.880	11,87	1.018.700.192.487	29,46
2	Inspektorat Jendral	4.753	32.052.620.798	4.752	99,98	31.867.620.798	99,42	1	0,02	185.000.000	0,58
3	Direktorat Jendral Perhubungan Darat	1.671.804	19.847.600.361.343	304.595	18,22	9.758.342.982.643	49,17	1.367.209	81,78	10.089.257.378.700	50,83
4	Direktorat Jendral Perhubungan Laut	265.620	60.686.536.122.833	210.262	79,16	43.358.110.104.721	71,45	55.358	20,84	17.328.426.018.112	28,55
5	Direktorat Jendral Perhubungan Udara	234.702	183.699.796.318.313	167.728	71,46	153.734.980.605.592	83,69	66.974	28,54	29.964.815.712.721	16,31
6	Direktorat Jendral Perkeretaapian	112.677	257.491.186.083.352	19.209	17,05	166.761.454.502.419	64,76	93.468	82,95	90.729.731.580.933	35,24
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	11.257	130.475.380.894	10.423	92,59	122.452.923.922	93,85	834	7,41	8.022.456.972	6,15
8	BPSDM Perhubungan	606.725	27.708.180.014.092	512.815	84,52	23.283.591.435.278	84,03	93.910	15,48	4.424.588.578.814	15,97
9	<b>Badan pengelola Transportasi Jabodetabek</b>	<b>285.244</b>	<b>671.603.989.366</b>	<b>188.421</b>	<b>66,06</b>	<b>398.378.935.870</b>	<b>59,32</b>	<b>96.823</b>	<b>33,94</b>	<b>273.225.053.496</b>	<b>40,68</b>
Jumlah		3.284.463	553.725.166.301.048	1.499.006	45,64	399.888.214.328.813	72,22	1.785.457	54,36	153.836.951.972.235	27,78

Dari tabel capaian PSP, dihitung Tingkat Pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Penilaian Indeks Pengelolaan Aset BPTJ

total yang harus di psp kan	285.244
total yang telah di psp kan s.d desember 2021	188.421
perbandingan	66,06%

Sementara Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN dinilai sebesar 100% atas dasar laporan BMN tiap bulan secara rutin telah disusun dan dilakukan rekonsiliasi. Sehingga Indeks Pengelolaan Aset BPTJ sebesar:

$$= (50\% \times 66,06\%) + (50\% \times 100\%) = 83,03\%$$

Sekretariat BPTJ melalui Subbagian Keuangan (BMN) terus melakukan monitoring dan pemantauan terkait Pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP).

#### **2.1.7. IKK18 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek**

Untuk IKK18 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ, mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang diukur melalui kuesioner dan dikonversi ke dalam bentuk persentase (%). Adapun target Pengukuran Indeks Layanan Perkantoran sebesar 65 yang diperoleh dari penilaian 6 (enam) indikator, yaitu:

- a. Pemenuhan Kebutuhan Kantor;
- b. Pemenuhan Kebutuhan Daya dan Jasa;
- c. Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Gedung Kantor;
- d. Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Mesin Kantor;
- e. Peningkatan dan Pemeliharaan Perangkat Komputer; dan
- f. Pengadaan Barang (Peralatan dan Mesin Perkantoran).

Pengukuran Indeks Layanan Perkantoran dilaksanakan oleh seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Layanan Perkantoran pada masing-masing instansi.

Subbagian Umum dan Rumah Tangga mengukur penilaian dengan menyebarkan kuesioner ke seluruh Pegawai di Lingkungan BPTJ. Data yang didapatkan dari penilaian kuesioner akan dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) sehingga mendapatkan capaian dari Pengukuran Indeks Layanan Perkantoran.

Kriteria Pengukuran Indeks Layanan Perkantoran diukur melalui penilaian 6 (enam) indikator, yaitu:

Tabel 2. 11 Data Perhitungan Capaian Layanan Perkantoran BPTJ

No	Uraian Kegiatan	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	Target	Prosentase Capaian	Capaian Akhir
1	Pemenuhan Kebutuhan Kantor	6,40%	22,50%	43,50%	27,60%	100	100,0%	73,08
	Penilaian Responden	25	50	75	100			
	Jumlah Capaian	1,6	11,25	32,625	27,6			
2	Pemenuhan Kebutuhan Daya dan Jasa	7,00%	20,70%	43,20%	29,10%	100	100,0%	73,60
	Penilaian Responden	25	50	75	100			
	Jumlah Capaian	1,75	10,35	32,4	29,1			
3	Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Gedung Kantor	1,90%	23,40%	47,70%	27,00%	100	100,0%	74,95
	Penilaian Responden	25	50	75	100			
	Jumlah Capaian	0,475	11,7	35,775	27			
4	Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Mesin Kantor	5,80%	24,00%	46,80%	23,40%	100	100,0%	71,95
	Penilaian Responden	25	50	75	100			
	Jumlah Capaian	1,45	12	35,1	23,4			
5	Peningkatan dan Pemeliharaan Perangkat Komputer	6,70%	22,80%	41,10%	29,40%	100	100,0%	72,39
	Penilaian Responden	25	50	75	100			
	Jumlah Capaian	1,675	11,4	30,825	28,49			
6	Pengadaan Barang (Peralatan dan Mesin Perkantoran)	1,90%	23,70%	44,10%	30,30%	100	100,0%	75,70
	Penilaian Responden	25	50	75	100			
	Jumlah Capaian	0,475	11,85	33,075	30,3			
<b>Rata - Rata Capaian Akhir</b>								<b>73,61</b>

Pengukuran Indeks Layanan Perkantoran BPTJ (IKK18) pada Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga Sekretariat BPTJ dari penilaian 6 (enam) indikator sebesar 73,61%. Dengan hasil tersebut maka Indeks Layanan Perkantoran BPTJ (IKK18) yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang diukur melalui kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) melebihi capaian target (65). Adapun target tercapai dikarenakan Efisiensi Anggaran dalam pelaksanaan dukungan penunjang perkantoran, dan Pemenuhan Dukungan Penanganan Pandemi Covid-19 di BPTJ.

Kemudian terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi serta Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan IV sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Permasalahan dan Tindak Lanjut Terkait Layanan Perkantoran BPTJ

Kegiatan	Permasalahan	Tindak Lanjut
Layanan Operasional Perkantoran	Tidak Ada Kendala dan Permasalahan	Melakukan Perencanaan Pelaksanaan untuk di Tahun 2022 dengan mengingat dan mempertimbangkan Kondisi Pandemi Covid-19 terbaru
Kebutuhan Perawatan Ruang dan Halaman Kantor BPTJ	Adanya perpindahan Ruang Kerja Kantor BPTJ dari Jl. MT. Haryono ke Kementerian Perhubungan serta Adanya pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai perencanaan yang sudah di jadwalkan	Sudah tidak ada pelaksanaan dikarenakan sudah menempati Gedung Kantor Kementerian Perhubungan
Kebutuhan Perawatan Peralatan dan Mesin Perkantoran BPTJ	Ketersediaan Anggaran dikarenakan Refocusing Anggaran dikarenakan Penanganan Pandemi Covid-19	Melakukan Perencanaan Pelaksanaan untuk di Tahun 2022 dengan mengingat dan mempertimbangkan Kondisi Pandemi Covid-19 terbaru
Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional Wilayah Jabodetabek	Pelaksanaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional merupakan kegiatan teknis di Direktorat Lalu Lintas, sehingga dalam penerapannya langsung dikerjakan oleh unit terkait.	Pelaksanaan Tetap dijalankan melalui Direktorat Lalu Lintas selaku Unit Kerja Teknis
Pemeliharaan Terminal	Pelaksanaan pemeliharaan difokuskan terhadap penyelenggaraan padat karya sehingga butuh perencanaan dalam saat melaksanakan kegiatan	Merencanakan pelaksanaan selanjutnya berkaitan dengan program padat karya dengan metode Swakelola di Terminal BPTJ

### 2.1.8. IKK19 Nilai Reputasi Positif Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Telah dilakukan perhitungan pada indikator kinerja kegiatan 19 yaitu Nilai Reputasi Positif Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Perhitungan Nilai Reputasi Positif BPTJ dilakukan terhadap masing-masing output dan outcome dari:

1. Pemberitaan Media Massa, Pengelolaan Media Sosial
2. Publikasi dan Dokumentasi serta pelayanan informasi publik

Adapun Rincian dan dasar perhitungan Nilai Reputasi Positif BPTJ sebagai berikut:

1. Perhitungan **Output** Pemberitaan Media Massa dan Pengelolaan Media Sosial
  - a. Media Sosial: Berdasarkan jumlah konten di media sosial Instagram
  - b. Pemberitaan: Berdasarkan jumlah berita yang dimuat di media mainstream dengan kata kunci BPTJ atau Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
2. Perhitungan **Outcome** Pemberitaan Massa dan Pengelolaan Media Sosial
  - a. Media Sosial: Berdasarkan hasil engagement rate atau interaksi setiap konten yang terupload di Instagram
  - b. Pemberitaan: Berdasarkan presentase berita positif atau netral yang dimuat di media mainstream atau jumlah berita positif/netral dibagi seluruh berita dikali 100
3. Perhitungan **Output** Publikasi Dan Dokumentasi Serta Pelayanan Informasi Publik
  - a. Placement : Berdasarkan jumlah placement yang dipublikasikan melalui media elektronik
  - b. Talkshow : Berdasarkan jumlah talkshow yang dilaksanakan pada radio di Jabodetabek
  - c. Spanduk : Berdasarkan jumlah (kuantitas) spanduk yang diproduksi
  - d. Brosur : Berdasarkan jumlah brosur yang diproduksi
  - e. Poster : Berdasarkan jumlah poster yang diproduksi
  - f. Dokumentasi Oleh Humas : Berdasarkan jumlah kegiatan yang terdokumentasi
  - g. Album : Berdasarkan jumlah album yang diproduksi
  - h. Video : Berdasarkan jumlah video yang diproduksi
  - i. Website : Berdasarkan jumlah seluruh publikasi yang

- j. PPID : ditayangkan pada Website BPTJ  
: Berdasarkan jumlah informasi serta merta, setiap saat yang di publish pada Website BPTJ
4. Perhitungan **Outcome** Publikasi Dan Dokumentasi Serta Pelayanan Informasi Publik
- a. Placement : Berdasarkan jumlah viewers dari placement yang dipublikasikan di media elektronik spesifik
- b. Talkshow : Berdasarkan jumlah pendengar talkshow pada radio spesifik
- c. Spanduk : Berdasarkan hasil survey eksternal BPTJ
- d. Brosur : Berdasarkan hasil survey eksternal BPTJ
- e. Poster : Berdasarkan hasil survey eksternal BPTJ
- f. Dokumentasi Oleh Humas : Berdasarkan hasil survey internal BPTJ
- g. Album : Berdasarkan hasil survey eksternal BPTJ
- h. Video : Berdasarkan hasil survey internal BPTJ
- i. Website : Berdasarkan jumlah visitor yang mengunjungi website BPTJ
- j. PPID : Berdasarkan jumlah visitor yang mengakses informasi PPID dalam website BPTJ

Rumus Perhitungan yang digunakan untuk Nilai Reputasi Positif BPTJ adalah enam puluh persen (60%) bobot nilai positif kegiatan pemberitaan media massa dan pengelolaan media sosial yang berasal dari output dan outcome kegiatan **Pemberitaan Media Massa** dan **Pengelolaan Media Sosial**, Empat puluh persen (40%) bobot nilai positif kegiatan publikasi dan dokumentasi dan kegiatan pelayanan informasi publik yang berasal dari output dan outcome kegiatan **Publikasi dan dokumentasi** serta **Pelayanan Informasi Publik**. Kemudian Bagian Humas melakukan pembobotan penilaian, sebagai berikut:

Tabel 2. 13 Penggabungan Nilai Positif Pemberitaan dan Pengelolaan Media Sosial Tahun 2021

Klasifikasi	Nilai Awal	Normalisasi Nilai	Kategori	Predikat
Output Pemberitaan	987	0,65	Baik	B
Outcome Pemberitaan	99%	0,97	Sangat Baik	A
Output Media Sosial	398	0,92	Sangat Baik	A
Outcome Media Sosial	0,79%	1	Sangat Baik	A
Jumlah Normalisasi Nilai				3,54
Rata-rata Nilai Subbag I				0,885
Bobot 60%				0,531
Pembulatan				53,1

Tabel 2. 14 Penggabungan Nilai Positif Publikasi dan Pelayanan Informasi Tahun 2021

Klasifikasi	Nilai Awal	Normalisasi Nilai	Kategori	Predikat
Output dan Outcome Publikasi & Dokumentasi				
Output Placement	4	1,00	A	Sangat Baik
Outcome Placement	15961950	0,76	B	Baik
Output Talkshow	3	0,75	B	Baik
Outcome Talkshow	967000	0,48	C	Cukup
Output Spanduk	129	0,34	D	Kurang
Outcome Spanduk	-	-	-	-
Output Brosur	-	-	-	-
Outcome Brosur	-	-	-	-
Output Poster	30	0,90	A	Sangat Baik

Klasifikasi	Nilai Awal	Normalisasi Nilai	Kategori	Predikat
Outcome Poster	-	-	-	-
Output Dokumentasi	86	0,65	B	Baik
Outcome Dokumentasi	4	0,75	B	Baik
Output Album	2	0,50	C	Cukup
Outcome Album	-	-	-	-
Output Video	16	1,00	A	Sangat Baik
Outcome Video	4	0,75	B	Baik
Output dan Outcome Pelayanan Informasi Publik				
Output Website	68	0,90	A	Sangat Baik
Outcome Website	168.586	1,00	A	Sangat Baik
Output PPID	9	1,00	B	Baik
Outcome PPID	2.562	0,38	D	Kurang
<b>Jumlah Normalisasi Nilai</b>				<b>11,16</b>
Rata-rata Nilai Subbag I				0,74
Bobot 40%				0,30
Pembulatan				29,76
Nilai Positif Pemberitaan dan Pengelolaan Media Sosial TA 2021				53,1
Nilai Positif Publikasi & Pelayanan Informasi TA 2021				29,76
<b>TOTAL NILAI AKHIR</b>				<b>82,86</b>

Kemudian terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Bagian Humas serta Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Permasalahan dan Tindak Lanjut Bagian Humas

Kegiatan	Permasalahan	Tindak Lanjut
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya informasi yang cepat dan tepat untuk bisa diakses secara online oleh Bagian Humas untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi data untuk menjawab pengaduan dan permohonan Informasi yang masuk</li> <li>- Beberapa pengaduan dan permohonan informasi yang masuk tidak sesuai dengan tupoksi BPTJ</li> <li>- Banyaknya keluhan yang masuk mengenai ASK namun belum dapat dilakukan monitoring secara langsung mengingat terbatasnya waktu dan SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan drive yang bisa diakses oleh PIC</li> <li>- Berkoordinasi dengan Tier I CC 151 secara intensif untuk menjawab pertanyaan yang tidak sesuai dengan tupoksi BPTJ</li> <li>- Perlu dilakukan pemetaan isu secara berkala terhadap pengaduan yang masuk tidak hanya pada skala layanan JRC namun juga layanan ASK</li> </ul>
Laporan Penyelenggaraan Penyusunan Materi Publikasi (Non Pemberitaan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Belum teridentifikasinya pemanfaatan dari media cetak Berita Trans</li> <li>-content belum bisa menggambarkan kinerja BPTJ secara keseluruhan</li> <li>- Hasil evaluasi yang belum fokus pada jumlah pembaca yang mengakses baik pada media cetak maupun online Berita Trans</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Perlu evaluasi secara mendalam terkait kebermanfaatan media cetak Berita Trans.</li> <li>-Perlu dibuatkan survey untuk mendapatkan opini masyarakat mengenai pelaksanaan talkshow</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah pendengar yang tune in pada saat talkshow belum bisa diidentifikasi secara realtime</li> <li>- Evaluasi dari pendengagr talkshshow belum dapat dijaring dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dilakukan evaluasi kebermanfaatan talkshow beserta materi yang disampaikan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pesan video dokumenter belum bisa dikemas dengan baik oleh pihak ketiga meskipun sistematika telah disusun dengan detail. Hal ini mempengaruhi bergesernya ouput video dari timeline yang telah ditentukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemilihan pihak ketiga perlu dipertimbangkan dengan cermat</li> </ul>
Penyusunan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kurang SDM yang menguasai editing video untuk melakukan perubahan dalam waktu singkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Mempertimbangkan penambahan jumlah SDM</li> </ul>
Laporan Penyelenggaraan Kampanye Jalan Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Dampak pelaksanaan kampanye jalanl hijau bagi masyarkat dan operaot belum dapat diukur secara langsung</li> <li>-Penyusunan rancangan peraturan untuk melegalkan kegiatan kampanye jalan hijau belum dapat dilakukan mengingat kondisi pandemi dan pemberlakukan PPKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menyusun legalitas Jalan Hijau</li> <li>-Menyusun landasan peraturan penerbitan Gerakan / Kampanye Jalan Hijau</li> </ul>

### 2.1.9. IKK20 Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan

Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan dihitung berdasarkan jumlah rancangan peraturan yang disusun dengan jumlah rancangan yang disahkan

Tabel 2. 16 Perhitungan Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang Telah Disahkan Menjadi Peraturan

Waktu	Disahkan	Hold	Total	Kumulatif
Triwulan I	23	2	0,3485	0,3485
Triwulan II	18	-	0,2727	0,6212
Triwulan III	17	2	0,2576	0,8788
Triwulan IV	4	-	0,0606	0,9394
Hasil Perhitungan	62	4		0,9394

Dari perhitungan tersebut, didapatkan capaian Indeks IKK20 Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah disahkan menjadi peraturan sebesar 93,94. Kemudian terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Bagian Hukum serta Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

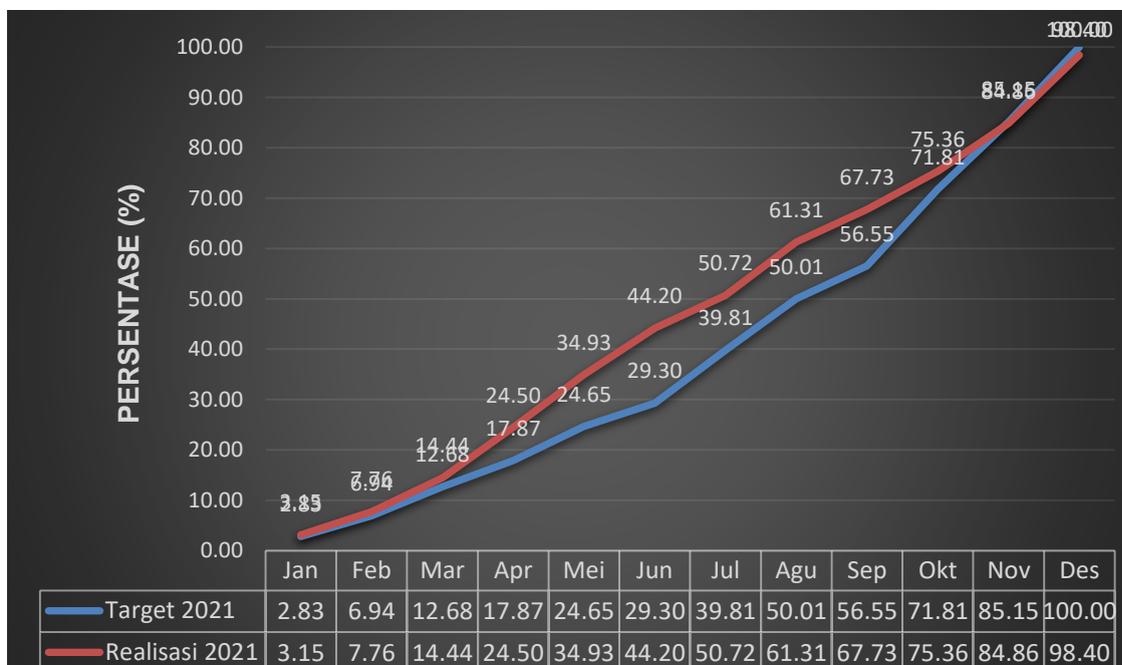
Tabel 2. 17 Permasalahan dan Tindak Lanjut Terkait Bagian Hukum

Kegiatan	Permasalahan	Tindak Lanjut
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Direktorat Teknis atau unit kerja di Sekretariat yang mengajukan rancangan peraturan belum tertib administrasi dalam mengusulkan peraturan	Agar Direktorat Teknis atau unit kerja di Sekretariat yang mengajukan rancangan peraturan untuk tertib administrasi dalam mengusulkan peraturan
	Direktorat Teknis atau unit kerja di Sekretariat hanya sebagian yang menyerahkan berkas asli peraturan ke bagian hukum untuk diarsip oleh bagian hukum	Berkoordinasi dengan Direktorat Teknis atau unit kerja di Sekretariat untuk menyerahkan berkas asli peraturan untuk diarsip oleh bagian hukum
	Terdapat beberapa rancangan peraturan yang diusulkan yang masih memerlukan penyempurnaan data-data teknis terkait substansi peraturan sebelum finalisasi peraturan	Rancangan peraturan disempurnakan terlebih dahulu sebelum diusulkan khususnya terhadap data-data teknis terkait substansi peraturan
Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum	Untuk tingkat Kementerian masih dalam proses <i>upload</i> ke dalam JDIH Kementerian Perhubungan	Meningkatkan koordinasi dengan direktorat teknis untuk setiap konsep peraturan ataupun peraturan yang sudah ditetapkan untuk dapat diperiksa ataupun didata oleh bagian hukum

Kegiatan	Permasalahan	Tindak Lanjut
	Untuk tingkat unit kerja eselon I proses <i>upload</i> dalam <i>website</i> BPTJ masih menunggu proses pembaharuan <i>website</i> BPTJ oleh Bagian Humas dikarenakan belum ada slot untuk jenis-jenis peraturan yang akan <i>diupload</i>	Koordinasi lebih lanjut dengan Bagian Humas terkait proses <i>pembaharuan website</i> BPTJ dikarenakan belum ada slot untuk jenis-jenis peraturan yang akan <i>diupload</i>
Sosialisasi Peraturan Teknis Bidang Transportasi	Rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi untuk tahun ini ditiadakan karena ada realokasi anggaran secara terpusat untuk penanganan covid	Pelaksanaan akan ditunda tahun 2022
Kerjasama di Bidang Transportasi	-	Bagian hukum sudah menyelesaikan target MoU dan PKS tahun ini
Pemberian Bantuan Hukum	perkara Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 228/G/TF/2021/PTUN-JKT saat ini dalam tahap pembuktian surat dan saksi	bagian hukum sebagai kuasa hukum terus melakukan koordinasi dengan biro hukum agar kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik

## 2.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Sekretariat BPTJ berdasarkan pagu awal tahun 2021 adalah sebesar Rp.86.164.007.000. Namun terdapat perubahan karena adanya refocusing anggaran sebagaimana tercantum dalam DIPA revisi 14 dengan jumlah anggaran Sekretariat sebesar Rp.84.567.314.000. Pada triwulan IV 2021, anggaran Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah terealisasi sebesar Rp. 83.216.121.615.



Gambar 2. 2 Kurva S Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Sekretariat BPTJ sampai dengan Triwulan IV

Tabel 2. 18 Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK Triwulan I s.d Triwulan III Tahun 2021

Indikator Kinerja Program	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
IKK18. Nilai SAKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	7,208,345,000	186,300,560	2,58	7,208,345,000	1.106.544.901	15,35	5,643,237,000	2,373,143,547	42,05
IKP19. Indeks Maturitas SPIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	500,000,000	-	0,00	500,000,000	11.104.500	2,22	208,968,000	44,009,500	21,06
IKK20. Indeks Reformasi Hukum Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	2,622,356,000	529,754,700	20,20	2,622,356,000	1.128.073.472	43,02	1,832,670,000	1,359,684,337	74,19
IKK21. Indeks Pengawasan Kearsipan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	562,425,000	1,281,000	0,23	560,790,000	116.533.000	20,78	433,847,000	283,428,680	65,33
IKK22. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	7,226,770,000	533,418,684	7,38	7,226,770,000	2.527.601.005	34,98	6,517,669,000	3,145,549,074	48,26
IKK23. Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	3,176,753,000	383,978,234	12,09	3,176,753,000	1.045.513.132	32,91	2,490,129,000	1,647,045,365	66,14
IKK24. Indeks Pelayanan Publik Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	5,965,750,000	158,079,540	2,65	5,965,750,000	1.751.763.177	29,36	3,973,128,000	2,664,555,277	67,06
IKK25. Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	58,901,608,000	10,421.243.624	17,69	63,803,632,000	29.692.191.802	46,54	63,467,666,000	45,762,250,376	72,10

Tabel 2. 19 Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKK Triwulan IV Tahun 2021

Indikator Kinerja Program	Triwulan IV		
	Anggaran	Realisasi	%
<b>IKK12</b> Nilai SAKIP BPTJ	5.599.925.000	5.524.689.094	98,66
<b>IKK13</b> Nilai Maturitas SPIP BPTJ	252.280.000	229.925.100	91,14
<b>IKK14</b> Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ	5.091.388.000	5.081.467.055	99,81
<b>IKK15</b> Indeks Profesionalitas ASN BPTJ	1.155.216.000	1.140.229.236	98,70
<b>IKK16</b> Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ	1.968.990.000	1.912.315.577	97,12
<b>IKK17</b> Indeks Pengelolaan Aset BPTJ	521.139.000	497.398.277	95,44
<b>IKK18</b> Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ	64.172.578.000	63.031.467.781	98,22
<b>IKK19</b> Nilai Reputasi Positif BPTJ	3.973.128.000	3.969.097.276	99,90
<b>IKK20</b> Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan	1.832.670.000	1.829.532.219	99,83

Capaian Kinerja Anggaran Sekretariat BPTJ pada Triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 30,67% dari progres capaian triwulan ke III. Kenaikan ini ditunjukkan dengan realisasi Triwulan IV yang mencapai 98,40% dibandingkan dengan realisasi pada triwulan III yang sebesar 67,73%. Realisasi anggaran Sekretariat BPTJ berdasarkan masing-masing indikator kinerja telah mencapai rata-rata 97,65% dengan hanya dua alokasi anggaran indikator yang realisasinya di bawah 97% yaitu IKK13 Nilai Maturitas SPIP BPTJ dan IKK17 Indeks Pengelolaan Aset BPTJ. Selebihnya realisasi anggaran IKK yang lain telah melebihi 97%.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2021 sudah ada realisasi anggaran yang mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Realisasi anggaran tersebut diperuntukkan beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. **IKK12** Nilai SAKIP BPTJ meliputi kegiatan:
  - Rapat Penyusunan Revisi II Perjanjian Kinerja BPTJ Tahun 2021;
  - Pembahasan Laporan Antara Renaksi RITJ 2020-2024;
  - Webinar dengan Topik “Masa Depan Mobilitas Udara Perkotaan Jabodetabek”;
  - Rapat Verifikasi RKA;
  - FGD Pembangunan sistem Big Data Asal Tujuan Pergerakan Orang di Jabodetabek;
  - Pembahasan Penyusunan Capaian Triwulan III di Lingkungan BPTJ Tahun 2021;
  - 17-18 Pemantauan aplikasi E-Monev PP 39 Tahun 2006 dan aplikasi SMART di Lingkungan BPTJ Tahun 2021;
  - 22-23 Rapat Koordinasi Teknis dengan topik “Integrasi Transportasi Menuju Seamless Mobility”;
  - 9-11 Monitoring Evaluasi Padat Karya dan Capaian Monitoring Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 di Lingkungan BPTJ;
  - Rencana Aksi (Renaksi) Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ (2020-2024));
  - Pembahasan Laporan Akhir Studi Renaksi RITJ;
  - 23-25 Monitoring Evaluasi Kegiatan Tahun 2021 pada aplikasi SMART dan aplikasi E-Monev PP 39 Tahun 2006 di Lingkungan BPTJ; dan
  - Evaluasi RKA 2022 dan rencana kegiatan anggaran 2023.
2. **IKK14** Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPTJ meliputi kegiatan:
  - Pemutakhiran Data Pegawai;
  - Penyusunan ABK JFT;
  - Pembahasan Tata Kelola BPTJ; dan
  - Pengadaan Pegawai di Lingkungan BPTJ berupa Seleksi Kompetensi Dasar CASN 2021 dan Seleksi Kompetensi Bidang CASN.
3. **IKK15** Indeks Profesionalitas ASN BPTJ meliputi kegiatan:
  - Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis di Lingkungan BPTJ berupa Bimbingan Teknis Etika dan Keprotokolan;
  - Bimbingan Teknis JFT Analisis Kebijakan;
  - Bimbingan Teknis seluruh JFT di Lingkungan BPTJ;
  - Telah dilaksanakan Sosialisasi Bidang Kepegawaian, yaitu Sosialisasi Zona Integritas – WBK;
  - Sosialisasi My SAPK; dan
  - Sosialisasi PEDOMAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN).

4. **IKK16** Indeks Pengelolaan Keuangan BPTJ meliputi kegiatan:
  - Konsinyering Input dan Verifikasi Detail Kegiatan pada Aplikasi SAKTI; dan
  - Evaluasi Keuangan.
5. **IKK17** Indeks Pengelolaan Aset BPTJ meliputi kegiatan:
  - Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN);
  - Penyusunan Laporan SIMAK BMN;
  - Penetapan Status Pengguna (PSP) BMN;
  - Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  - Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Melalui Aplikasi SAIBA; dan
  - Pengelolaan Administrasi Penggajian
6. **IKK18** Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran BPTJ meliputi kegiatan:
  - Pelaksanaan Kegiatan Rutinitas Layanan Perkantoran seperti kegiatan pengadaan ATK, dan Kegiatan Penanganan Pandemi Covid 19 bagi Pegawai di BPTJ; dan
  - Kegiatan Pengadaan, pemeliharaan peralatan fasilitas, komputer, dan mesin perkantoran dan di terminal (satuan pelayanan BPTJ)
7. **IKK19** Nilai Reputasi Positif BPTJ meliputi kegiatan:
  - Menyusun daftar pengaduan untuk ditindaklanjuti oleh Direktorat teknis terkait;
  - Evaluasi dan monitoring pelaksanaan CC 151 di seluruh terminal yang berada di bawah pengelolaan BPTJ;
  - Talkshow Radio di Wilayah Jakarta dan Bogor terkait Sosialisasi BISKITA TRANSPAKUAN;
  - Pembuatan Video 'Langkah dan Kebijakan BPTJ di Masa Pandemi, Pembangunan Sistem Big Data Asal Tujuan Pergerakan Orang di Jabodetabek dan 6 Kota Besar di Indonesia, Perjalanan Kepemimpinan Kepala BPTJ Periode 2020-2021, Podcast Tokoh Inspiratif Kepala BPTJ;
  - Pembuatan dan pencetakan spanduk, standing banner dan sticker perihal jadwal keberangkatan Terminal Baranangsiang;
  - Penyusunan dan Pencetakan Buku 'Langkah dan Kebijakan BPTJ di Masa Pandemi;
  - Pembuatan dan Pencetakan Album Foto Pimpinan Semester 2;
  - Pendokumentasian Kegiatan Padat Karya di Terminal Pondok Cabe;
  - Pendokumentasian Kunjungan Kerja Menteri Perhubungan meninjau GAGE Puncak, kegiatan PPI Curug;
  - Monitoring dan Evaluasi PPID;
  - Pendampingan untuk pengambilan gambar Stock Shoot Video Langkah dan Kebijakan BPTJ di Masa Pandemi, Pendampingan Kepala BPTJ untuk kegiatan Talkshow Radio terkait Sosialisasi BISKITA TRANSPAKUAN;

- Melaksanakan kegiatan wawancara khusus bersama Kepala BPTJ terkait persiapan uji coba BISKITA Trans Pakuan;
  - Laporan Penyelenggaraan Kampanye Jalan Hijau;
  - Pembuatan Barcode Permohonan layanan informasi pada standing banner;
  - Pemasangan Spanduk dan X-Benner mengenai Pelayanan Informasi;
  - Updating Daftar Informasi Publik (DIP) pada website BPTJ;
  - Penyusunan daftar informasi secara berkala;
  - Mengikuti Rakor Pelayanan Informasi Publik;
  - Melakukan konsolidasi Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kemenhub; dan
  - Diskusi Isu Strategis Transportasi Perkotaan bersama pakar/pemerhati transportasi perkotaan
8. **IKK20** Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan meliputi kegiatan:
- Rapat pembahasan terkait penyusunan dasar hukum;
  - Melaksanakan pendataan dokumentasi semua produk dan layanan hukum sehingga terbentuk suatu jaringan informasi yang mudah diakses;
  - Telah dilaksanakannya sosialisasi peraturan perundang-undangan terutama di bidang transportasi;
  - penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan baik itu kerjasama ataupun kesepakatan di bidang transportasi; dan
  - kegiatan bantuan dan pertimbangan hukum kepada unit kerja BPTJ, pejabat, mantan pejabat, pegawai dan pensiunan pegawai guna kelancaran pelaksanaan tupoksi BPTJ dan proses penegakan hukum

## BAB III PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2021, terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang telah dihitung capaian pelaksanaannya. Adapun rincian capaian masing-masing IKK pada triwulan III adalah
  - a. **IKK12** Nilai SAKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 70,10 (target 70);
  - b. **IKK13** Nilai Maturitas SPIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 3,755 (target 3,15);
  - c. **IKK14** Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 99,92 (target 72);
  - d. **IKK15** Indeks Profesionalitas ASN Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 53,55 (target 74);
  - e. **IKK16** Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 90,53 (target 87);
  - f. **IKK17** Indeks Pengelolaan Aset Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 83,03 (target 60);
  - g. **IKK18** Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 73,61 (target 65);
  - h. **IKK19** Nilai Reputasi Positif Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 82,86 (target 81);
  - i. **IKK20** Persentase Dokumen Rancangan Peraturan yang telah Disahkan Menjadi Peraturan terealisasi sebesar 93,94 (target 74)
2. Realisasi anggaran Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada triwulan IV tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 30,67% dari progres capaian triwulan ke III. Kenaikan ini ditunjukkan dengan realisasi Triwulan IV yang mencapai 98,40% dibandingkan dengan realisasi pada triwulan III yang sebesar 67,73%
3. Untuk meningkatkan capaian kinerja triwulan selanjutnya, Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan di lingkungan Sekretariat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek